



▶ PKL MALIOBORO

Forpi Investigasi Kasus Jual Beli Lapak

UMBULHARJO—Isu jual beli lapak PKL di kawasan Malioboro dengan nilai transaksi mencapai puluhan juta rupiah di kawasan Malioboro disikapi serius oleh Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Jogja.

buul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Anggota Forpi Kota Jogja Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba mengaku siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dugaan jual beli lapak di kawasan Malioboro.

▶ Forpi Jogja meminta agar PPM A. Yani membuktikan tudingannya soal jual beli lapak.

▶ Isu jual beli lapak bisa menurunkan citra Malioboro.

Hal itu dilakukan untuk menjaga nama baik Malioboro sebagai ikon wisata andalan Jogja. "Ini agar masalahnya tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi Malioboro," kata dia, Kamis (6/9).

Dia mendesak Pemkot untuk segera menindaklanjuti aduan Perkumpulan Pengusaha Malioboro (PPM) A. Yani. "Meski hanya sebatas dugaan dan tidak ada laporan resmi ke UPT Malioboro, tapi hal itu perlu segera ditelusuri.

Biar terang benderang dan tak berujung pada fitnah," ujar Kamba.

Dalam kasus ini, kata Kamba, setidaknya Pemkot bisa mengambil langkah awal dengan mencari bukti-bukti pendukung terkait aduan yang disampaikan PPM A. Yani. Apalagi, katanya, isu adanya jual beli lapak PKL di kawasan Malioboro bukanlah hal baru. "Itu isu lama. Kami pernah menerima informasi itu. Makanya harus dibuktikan kebenarannya agar tidak menjadi fitnah liar," kata Kamba.

Sebelumnya, Ketua PPM A. Yani Sadana Mulyono mengadukan masalah PKL Malioboro kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, Senin (3/9) lalu. Salah satu yang bikin PPM A. Yani gerah adalah adanya aktivitas jual beli lapak PKL. Menurut Mulyono sejak sekian

lama lapak PKL diperjualbelikan dan disewakan oleh PKL. Harga sewanya juga fantastis, mulai Rp25 juta hingga Rp100 juta per tahun. Seharusnya masing-masing PKL hanya boleh punya satu lapak tapi nyatanya, menurut Mulyono, seorang pedagang bisa memiliki lima lapak.

Untuk itu, Kamba pun meminta PPM A. Yani membuktikan tuduhan tersebut. Jika tuduhan itu benar, maka bukan hanya Pemkot yang seharusnya bertindak. Aparat hukum dari kepolisian atau kejaksaan juga bisa ikut serta menelusuri lebih lanjut.

Menurut dia kebijakan penggunaan lahan di kawasan Malioboro juga melibatkan Pemkot. Pemkot pula yang berwenang menata PKL di kawasan Malioboro.

"Siapa tahu ada orang dalam ikut bermain (praktik jual beli

lapak). Ini yang harus diselidiki. Kalau soal jual beli itu ranahnya hukum perdata," ujar Kamba.

Soal tuduhan itu, dua perkumpulan komunitas PKL Malioboro membantah tuduhan PPM A. Yani. Wakil Ketua Paguyuban Koperasi PKL sisi barat Malioboro Tri Dharma Paul Zulkarnain menjelaskan dari 1.300 anggota Koperasi PKL Tri Dharma tidak ada yang menjual belikan lapak hingga puluhan juta rupiah per lapak. Selama ini yang ada hanya pengalihan pemilik.

"Misalnya, dari sebelumnya digunakan oleh ayahnya karena meninggal sekarang digunakan oleh anaknya," kata Paul.

Senada, Ketua Paguyuban Pelukis, Perajin dan PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pamalni) Slamet Santoso mengatakan selama ini tidak ada praktik jual beli lapak.

Instansi	Lanjut
1.anggapi
2.ketahui
3.ers
4.	
5.	

Yogyakarta,
 Plt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005